

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT**

Langkah-langkah politik luar Negara-negara di dunia internasional cenderung membuat prediksi spekulatif atau imaj i terhadap kebij akan luar negeri Amerika. Pada bab ini akan dibahas langkah-langkah politik luar negeri Amerika Serikat terhadap dunia Internasional, serta langkah politik luar negeri yang di ambil Amerika terhadap Libya pada saat revolusi di Libya 2011

#### **A. Politik Luar Negeri Amerika Serikat**

Politik luar negeri pada dasarnya merupakan keseluruhan sikap dan aktivitas sebuah negara untuk menanggulangi masalah sekaligus memetik keuntungan dari lingkungan internasionalnya. Dengan demikian, politik luar negeri sesungguhnya merupakan hasil dari interaksi lingkungan domestik dan lingkungan eksternalnya. Namun demikian, politik luar negeri suatu negara pasti ditujukan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Karena itu, ada dua unsur fundamental dari politik luar negeri, yaitu tujuan nasional dan alat untuk mencapainya. Ini pula yang mempengaruhi politik luar negeri sebuah negara, termasuk Amerika Serikat.

Perjalanan sejarah telah mencatat pasca berakhirnya perang dingin Amerika Serikat tampil sebagai Negara penguasa dunia. Perolehan status

Amerika sebagai “pemimpin” dunia tentunya tidak terlepas dari berbagai strategi yang dibangun dan dilaksanakan oleh segenap aparatur pelaksana Negara, baik dalam skala nasional maupun internasional namun terlepas dari segenap dukungan tersebut Presiden tetaplah memegang peranan yang sangat besar. Presiden dapat disebut sebagai wahana dan pelaksana yang menjalankan kebijakan Negara untuk mencapai tujuan-tujuan Negara berdasarkan prinsip-prinsip Negara yang telah ditetapkan.

Politik Luar Negeri Amerika Serikat mengalami perubahan paling dramatis di awal abad 21 satu ketika terjadi peristiwa serangan 11 September 2001 terhadap gedung World Trade Centre dan Pentagon. Cara pandang Amerika Serikat, baik terhadap, keamanan, ekonomi-politik, hingga hak asasi manusia mengalami perubahan paling signifikan sejak perang dingin berakhir.<sup>13</sup>

Dalam dua dekade ini Amerika dipimpin oleh dua orang Presiden yang memiliki perbedaan yang relatif signifikan. Namun yang pasti antara George Walker Bush dan Barack Obama memiliki kepentingan yang sama, yakni mencapai segenap kepentingan nasional Amerika serta menjaga status kepemimpinan Amerika di dunia.

Untuk menjaga kepentingan nasionalnya sekaligus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dunia, pada masa kepemimpinannya Bush pernah mengumandangkan “Doktrin Bush” setelah peristiwa 11 September

---

<sup>13</sup>. Stephen M. Walt, 2002, *Beyond Bin Laden: Reshaping U.S. Foreign Policy dalam America and the World, Debating the New Shape of International Politics*, New York: Council and Foreign Relations Inc., hal. 320.

2001, dihadapan kongres Amerika Serikat pada tanggal 20 September 2001. Bush mengeluarkan ancaman kepada dunia internasional, "*Either you with us or you are with the terrorist*". Bush juga menyatakan, "*if you are not with us, you are against us*". Pernyataan yang lebih dikenal sebagai doktrin Bush ini jelas-jelas memaksa Negara-negara lain di dunia menentukan sikap dan seolah membagi bumi menjadi dua belahan, yakni teroris dan bukan teroris.<sup>14</sup> Doktrin inilah yang melegitimasi serangan Amerika Serikat ke Afganistan dengan alasan untuk menumpas terorisme.

Tidak lama waktu berselang, tepatnya pada tahun 2002, Bush mengumumkan doktrin *preemption* dalam pidatonya dihadapan lulusan Akademi Militer West Point. Doktrin yang juga dikenal dengan istilah *Preemptive Military Strike Doctrine* ini adalah kebijakan yang merupakan bagian dari strategi keamanan Amerika Serikat dalam upaya menjaga kepentingan nasionalnya. Doktrin ini jugalah yang kemudian membuka jalan invasi Amerika ke Irak tahun 2003.<sup>15</sup>

Namun demikian kampanye global Amerika Serikat dalam memerangi teroris melahirkan banyak kontradiksi, mengingat kebijakan Amerika Serikat tersebut, terutama dengan melancarkan invasi ke Afganistan, kemudian selanjutnya disusul ke Irak, dan berujung kepada penangkapan begitu banyak orang-orang yang dianggap sebagai pelaku terror, menuai banyak kritik. Di dunia internasional dukungan datang dari sekutu-sekutu Amerika Serikat

---

<sup>14</sup>. Michael Byers, "Terrorism: The Use of Force and International Law After 11 September", dalam *International Relations Journal*, Vol. 6. No. 2, New York: Prentice Hall Inc., hlm. 155.

<sup>15</sup>. Michael Byers, *Terrorism: The US of Force and International Law after 11 September*, *International Relations Journal*, Vol. 6. No. 2, New York: Prentice Hall Inc., hal. 155.

yang loyal, namun banyak pihak melihat betapa buruknya dampak yang dihasilkan dari kebijakan utilitarian tersebut. Salah satu kebijakan Amerika Serikat yang mendapat perhatian serius adalah kebijakan Amerika Serikat yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)

Amerika Serikat di awal abad 21 ini menjadi Negara super power dengan citra buruk, terutama terkait dengan isu HAM. Simpati yang begitu banyak diberikan kepada Amerika Serikat pasca 11/9 seolah sirna dengan citra buruk kebijakan agresif Amerika Serikat di Afganistan dan Irak, serta perilaku Amerika Serikat dalam menangani kelompok dan orang-orang yang dianggap terlibat terorisme.

Pada masa pemerintahan Barrack Obama sekarang kebijakan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Bush kini sedang ditinjau ulang. Hal tersebut dilakukan untuk mengembalikan citra Amerika Serikat di mata dunia/internasional. Jika Pentagon menganggapnya tidak sesuai dengan situasi saat ini maka kebijakan itu akan dicabut dalam *Quadrennial Defense Review* (peninjauan pertahanan tiap empat tahun).

Namun demikian perubahan kebijakan dan cara pandang Amerika Serikat terhadap politik global, terutama terkait isu HAM, mengalami perubahan cukup penting setelah lengsernya Bush dan terpilihnya Obama sebagai Presiden Amerika Serikat di tahun 2009. Seolah ingin mengembalikan citra Amerika Serikat sebagai Negara demokrasi dan penegak HAM, pemerintahan presiden Amerika Serikat Obama bergerak cepat dengan terus mengampanyekan penegakan HAM dan demokrasi.

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat dibawah Obama, melalui doktrin Obama, ingin mengembalikan kebijakanyang pro terhadap HAM.<sup>16</sup>

Selain itu, terkait hubungan Amerika Serikat dengan dunia Islam, yang selama ini cukup berjarak menyusul kampanye Amerika Serikat dibawah Bush yang sarat dengan benturan antar peradaban Barat dan Islam, Obama langsung menegaskan bahwa Amerika Serikat bukanlah musuh Islam, begitu juga sebaliknya. Dalam pidatonya di Kairo , Obama menyatakan:

*"I made clear that America is not and never will be at war with Islam. We will, however, relentlessly confront violent extremists who pose a grave threat to our security because we reject the same thing that people of all faiths reject; the killing of innocent men, women and children".<sup>17</sup>*

Terkait isu HAM , Obama menentang dengantegas cara-cara represi dalam penegakan HAM. Ia mengatakan:

*"The promotion of human rights cannot be about exhortation. At times, it must be coupled with painstaking diplomacy. I know that engagement with repressive regimes lacks the satisfying purity of indignation. But I also know that sanctions without outreach condemnation without discussion can carry forward only a crippling status quo".<sup>18</sup>*

## **B. Arah Politik Luar Negeri Amerika Serikat**

Amerika Serikat adalah sebuah Negara idealis. Negara ini dibangun atas dasar ideologi kapitalisme. Politik luar negeri Amerika Serikat tidak bias dilepaskan dari basis ideologi kapitalisme ini. Dalam format politik internasional Amerika Serikat dua pilar yang paling mengemuka yang

---

<sup>16</sup>. Amita Etzioni, 2010, Obama Implicit Human Right Doctrine, diakses melalui

<http://icps.gwu.edu/files/2011/02/obama-human-rights.pdf> diakses pada tanggal 10 Juni 2013

<sup>17</sup>. Barack Obama, 2009, Remarks by the President on a New Beginning, diakses melalui [http://www.whitehouse.gov/the\\_press\\_office/Remarks-by-the-President-at-Cairo-University-6-04-09](http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-by-the-President-at-Cairo-University-6-04-09), diakses pada tanggal 10 Juni 2013

<sup>18</sup>. Barack Obama, 2009, Remarks by the President at the Acceptance of the Nobel Peace Prize, diakses melalui <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-acceptance-nobel-peace-prize> diakses pada tanggal 10 Juni 2013

dijadikan kebijakan pokok Negara adidaya itu adalah demokratisasi (termasuk HAM) dan liberalism ekonomi dunia

Dari dua pilar tatanan dunia yang diatwarkan Amerika Serikat ini jelas merupakan inti dari ideologi kapitalisme yang memang sudah lama diemban dan disebar luaskan oleh Amerika Serikat. Bagi Amerika Serikat, tegaknya dua pilar ini menguntungkan kepentingan mereka. Karena itu, tidak aneh jika Amerika Serikat demikian bersemangat menjajakan kedua perkara tersebut. Dengan kata lain Amerika Serikat saat ini hendak menjadikan kapitalisme sebagai 'Agama Baru' di seluruh dunia.

#### **1. Langkah Politik Amerika Serikat**

Untuk memperjuangkan ideologinya, langkah pertama yang dilakukan Amerika Serikat adalah mengajak seluruh dunia untuk menjadikan capitalism sebagai standar, persepsi, serta keyakinan yang berlaku di segala aspek kehidupan bagi seluruh umat manusia. Untuk itu, Amerika Serikat melakukan internasionalisasi ideologi kapitalisme sebagai asas interaksi dan UU internasional. Amerika Serikat dan sekutunya kemudian membentuk PBB dan piagam PBB, yang menjadi legitimasi dan alat kepentingan internasionalnya. Sebagai pembentuk badan internasional itu, Amerika Serikat tentu harus mendapat jaminan, bahwa kepentingan-kepentingannya tetap bisa terjamin. Dari sana, dibuatlah Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dengan anggota tetap yang memiliki hak veto. Dengan hak ini, Amerika Serikat dapat dengan

mudah menggagalkan keputusan yang dianggap bertolak belakang dengan kepentingannya.

Dalam bidang politik, berbagai aturan yang jelas-jelas bersumber dari ideologi kapitalisme dibuat dan diinternasionalisasikan. Lahirlah antara lain Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Right*) tahun 1948. Deklarasi ini mencantumkan penjaminan atas kebebasan manusia, terutama kebebasan beragama, pendapat, kepemilikan, dan perilaku. Internasionalisasi ini dibutuhkan Amerika Serikat agar setiap tindakannya di dunia internasional menjadi legal atau sah meskipun sekedar untuk kepentingan nasional (*National Interest*) Amerika Serikat semata.

## **2. Langkah Ekonomi Amerika Serikat**

Dalam bidang ekonomi, internasionalisasi kepentingan Amerika Serikat dilakukan dengan memuat suatu tatanan ekonomi internasional dengan seperangkat organisasinya seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Langkah paling penting dilakukan Amerika Serikat adalah mengubah sistem mata uang dunia dengan menjadikan dolar sebagai standar untuk menilai mata uang yang berbeda-beda. Tahun 1944, delegasi 44 negara yang mengadakan pertemuan di Bretton Woods menerima gagasan itu. Amerika Serikat bisa memaksa penggunaan dolar karena saat itu Amerika Serikat merupakan negara yang sangat kuat secara politik dan militer di dunia. Dolar Amerika Serikat sejak saat itu mendominasi dunia.

Untuk lebih menjamin kepentingan Amerika Serikat, negara itu membentuk badan internasional seperti IMF. Meskipun didukung negara-negara Barat lain, Amerika Serikat-lah yang memiliki saham yang paling banyak di IMF. Karena itu, bisa dikatakan, kepentingan IMF hampir identik dengan kepentingan Amerika Serikat.

Untuk memperkokoh dominasinya atas negara-negara miskin, IMF memberikan bantuan utang. Tidak jarang, itu dilakukan dengan terlebih dulu mereayasa krisis di sebuah wilayah. Akibatnya, negara tersebut membutuhkan pinjaman utang, dan yang bersangkutan harus menjalankan program-program IMF. Padahal, program IMF tersebut justru acapkali membawa dampak ekonomi dan sosial yang lebih parah bagi negara pengutang, dan sebaliknya menguntungkan negara-negara maju.

Beberapa program yang sering diisyaratkan IMF, antara lain, adalah suku bunga tinggi; yang mengakibatkan mandeknya roda perekonomian dan industri, IMF juga memaksa negara pengutang untuk mengurangi belanja negara dengan meningkatkan pajak dan tarif jasa serta menghentikan subsidi untuk barang-barang konsumtif. Implikasinya, beban masyarakat semakin berat disebabkan naiknya biaya bagi sektor jasa seperti telekomunikasi, transportasi, listrik, air, pendidikan, dan kesehatan. IMF juga menyaratkan perdagangan bebas dan kebebasan berinvestasi.

Persoalan semakin runyam karena IMF sering mengabaikan biaya sosial (social cost) yang harus dibayar dari program-program mereka. Indonesia, misalnya, harus mengalami kekacauan politik dan sosial akibat

menerapkan 'nasihat' IMF. Naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan minyak akibat pencabutan subsidi, demikian juga tarif listrik dan air, membuat masyarakat semakin berat kehidupannya. Tidak aneh jika kemudian terjadi kerusuhan di mana-mana. Bukti terbaru tentang ini adalah kekacauan di Argentina.

Di sisi lain, kondisi kekacauan ini juga dijadikan kesempatan bagi Barat untuk menerapkan ide-ide demokrasi dan kebebasan serta menjatuhkan pemerintahan yang dianggap tidak akomodatif lagi dengan kepentingan Amerika Serikat. Hal seperti ini terjadi di Indonesia, Yordania, dan Maroko.

Di samping program IMF, perdagangan bebas juga menjadi program utama dari WTO yang pembentukannya dipelopori Amerika Serikat. Tujuan utama dari liberalisasi perdagangan ini adalah untuk membuka pasar seluruh negara-negara di dunia bagi produk unggul dan investasi negara-negara kapitalis. Dengan demikian, negara-negara berkembang akan selalu berada dibawah hegemoni Amerika Serikat.

Tidak diragukan lagi, perdagangan bebas, dalam kondisi sekarang, lebih memiskinkan Dunia Ketiga. Liberalisasi perdagangan, pada faktanya, hanya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan negara-negara maju sebagai akibat adanya perbedaan yang tajam dalam daya saing. Barat lebih diuntungkan karena mereka memang lebih unggul dilihat dari kemampuan sumberdaya manusia serta basis industri dan teknologi. Padahal, ketiga perkara itu mutlak dibutuhkan dalam perdagangan bebas.

Sama halnya dengan kebebasan investasi yang lebih menguntungkan Barat. Bagaimanapun, dalam kondisi ekonomi dunia yang terpuruk seperti ini, hanya Barat yang memiliki modal yang besar untuk melakukan investasi dan membeli modal-modal perusahaan di negara berkembang. Akhirnya, kekuatan modal Barat akan memonopoli perdagangan dan industri di negara-negara miskin.

Dampak perdagangan bebas ini tampak dalam sebuah survey yang berjudul, "*Trade Liberalitation: Global Economic Implication*," yang dilakukan OECD (1993). Lembaga itu memperkirakan bahwa perdagangan bebas akan memberikan keuntungan kepada negara-negara besar di berbagai kawasan seperti Masyarakat Eropa, Cina, Jepang, dan Amerika Serikat. Sebaliknya, Indonesia, bersama kawasan Mediterania dan Afrika, akan mengalami kerugian.

### **3. Dari Biopolar ke Unipolar**

Politik luar negeri pada dasarnya merupakan keseluruhan sikap dan aktivitas sebuah negara untuk menanggulangi masalah sekaligus memetik keuntungan dari lingkungan internasionalnya. Dengan demikian, politik luar negeri sesungguhnya merupakan hasil dari interaksi lingkungan domestik dan lingkungan eksternalnya. Namun demikian, politik luar negeri suatu negara pasti ditujukan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Karena itu, ada dua unsur fundamental dari politik luar negeri, yaitu tujuan nasional dan alat

untuk mencapainya. Ini pula yang mempengaruhi politik luar negeri sebuah negara, termasuk Amerika Serikat.

Dalam lingkup eksternal Amerika Serikat, yaitu dunia internasional, salah satu peristiwa besar yang mengubah arah kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat adalah runtuhnya Uni Soviet. Sebelumnya, saat Soviet masih jaya, dunia didominasi oleh dua kubu (bipolar), yaitu kubu Amerika Serikat dengan kapitalismenya dan Soviet dengan komunismenya. Saat itu, masih terjadi *balance of power* (keseimbangan kekuasaan) di antara dua kubu tersebut. Akibatnya, setiap tindakan sebuah negara dari masing-masing kubu pasti dipengaruhi oleh keseimbangan kekuasaan tersebut. Hal yang sama terjadi pada Dunia Islam; keadaan mereka sangat dipengaruhi oleh dua kubu tersebut.

Akan tetapi, setelah runtuhnya Blok Komunis, tatanan dunia internasional menjadi unipolar. Kekuatan dunia didominasi hanya oleh satu kubu saja, yaitu Blok Kapitalis yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Pada awalnya, banyak pihak berharap, berakhirnya Perang Dingin (*Cold War*) ini membuat dunia semakin damai. Namun, kenyataannya adalah sebaliknya. Amerika Serikat, dengan dominasi tunggalnya, justru menyebarkan kerusakan dan kehancuran di seluruh dunia. Pangkalnya, Amerika Serikat dengan keserakahan kapitalismenya, ingin lebih memperkuat penjajahannya atas negara-negara lain. Semuanya demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Amerika Serikat. Amerika Serikat, dengan gaya hidup

masyarakatnya yang materialistik dan konsumeristik, selalu tidak puas, belum merasa aman, dan senantiasa merasa terancam kesejahteraannya.

Amerika Serikat kemudian merancang apa yang mereka sebut dengan *The New Order* (Tatanan Dunia Baru) yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Tatanan Dunia Baru itu tidak lebih merupakan keinginan Amerika Serikat untuk menjadikan seluruh dunia tunduk kepada Amerika Serikat dan mengikuti selernya. Tatanan Dunia Baru ini lebih tepat disebut *Pax Americana*, sebuah tatanan Amerika untuk seluruh dunia. Proposal *Pax Americana* ini pernah ditawarkan oleh Senator dari Kubu Demokrasi, Joseph Biden, 10 tahun yang lalu pasca Perang Teluk II. Perlu diketahui, Josep Biden sekarang merupakan ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, yang banyak mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Waktu itu, Biden menawarkan proposal strategi pertahanan Amerika Serikat kepada Pentagon. Dalam draft itu disebutkan adanya beberapa hal pokok antara lain:

Rancangan bagi sebuah tatanan internasional unipolar, dengan memberikan penghargaan (*reward*) atau hukuman bagi negara-negara asing (diluar Amerika Serikat) berdasarkan penghargaan mereka kepada keinginan Washington.

Tujuan dasar dari strategi Amerika Serikat pada era baru adalah untuk mencegah munculnya kekuatan tandingan yang baru, baik dalam level global maupun wilayah-wilayah geo-strategis yang penting. Tercakup dalam

wilayah ini adalah Eropa Barat, Asia Timur, bekas negara-negara Soviet, dan Asia Barat Daya.

Untuk wilayah Timur Tengah dan Asia Barat Daya, tujuan strategi Amerika Serikat adalah menyisakan kekuatan luar yang dominan dan mengamankan akses Amerika Serikat dan Barat terhadap minyak di daerah tersebut.

#### **4. Memerangi Terorisme demi Kepentingan Ekonomi**

Salah satu perubahan penting lain dari politik luar negeri Amerika Serikat pasca Perang Dingin adalah dimunculkannya kampanye perang melawan terorisme, terutama sejak ledakan Gedung WTC. Meskipun pada masa Perang Dingin, isu terorisme bukan merupakan perkara baru, namun sekarang, ia telah menjadi agenda bersama negara-negara Barat dan pengikut-pengikutnya. Apalagi perang ini kemudian dikampanyekan sebagai perang melawan pihak-pihak yang menentang peradaban dunia perang membela demokrasi dan HAM.

Secara teoritis, politik luar negeri pasti ditujukan untuk mencapai kepentingan suatu negara. Karena itu, tujuan nasional sebuah negara adalah perkara yang sangat penting. Menurut Holsti, salah satu bentuk tujuan negara adalah nilai dari kepentingan inti yang melibatkan setiap eksistensi (keberadaan) pemerintah dan bangsa yang harus dilindungi dan diperluas<sup>19</sup> Lebih jauh, Holsti menjelaskan, tujuan untuk kepentingan dan nilai inti ini

---

<sup>19</sup>. Holsti K.J, Politik Internasional Jilid 2: Kerangka untuk Analisis (Jakarta: Erlangga, 1988) 137

dapat digambarkan sebagai jenis kepentingan yang, untuk mencapainya, kebanyakan orang bersedia melakukan pengorbanan yang sebesar-besarnya. Nilai dan kepentingan inti ini biasanya ditemukan dalam bentuk asas-asas pokok kebijakan luar negeri dan menjadi keyakinan yang diterima masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, apa sebenarnya kepentingan inti Amerika Serikat: membela demokrasi dan HAM atau ekonomi? Dilihat dari segi bahwa Amerika Serikat adalah negara kapitalis, jelas kepentingan ekonomi adalah kepentingan inti mereka. Apa yang mereka sebut sebagai HAM dan demokrasi akan gampang dicampakkan demi kepentingan ekonomi mereka. Sebaliknya, HAM dan demokrasi akan digunakan jika sejalan dengan kepentingan ekonomi mereka. Bukti-bukti tentang ini sudah demikian banyak.

Hal ini tampak dari alasan-alasan yang dikemukakan Amerika Serikat ketika menyerang Granada, Irak, Libya, Somalia, dan beberapa daerah lainnya. Mengatasnakan PBB, Amerika Serikat berdalih, bahwa semua tindakannya itu semata-mata untuk memelihara keamanan dunia, demokrasi, dan HAM. Tahun 1986, alasan ini dikemukakan Presiden Ronald Reagan saat memborbadir Libya, "*...cotributing to an international enviroment of peace, freedom, and progress within our democracy and other free nations can flaourish.*" (memberikan sumbangan bagi tatanan perdamaian dunia, kebebasan, dan kemajuan dimana demokrasi kita dan kebebasan bangsa-bangsa lain bisa tumbuh subur).

Hal senada diungkapkan oleh George Bush ketika menyerang Irak tahun 1990-1991, *"Our jobs, our way of life, our own freedom and the freedom of friendly countries around the world would all suffer if control of the greatest oil reserves (i.e Saudi Arabia) fell into the hands of Saddam."*

"Tugas kita, pandangan hidup kita, kebebasan kita, dan negara-negara bersahabat lainnya di seluruh dunia akan terancam jika kontrol terhadap sumber minyak terbesar dunia [Saudi Arabia] jatuh ke tangan Saddam."

Alasan-alasan ini (demokrasi dan HAM) juga digunakan untuk menjatuhkan negara-negara atau kelompok-kelompok yang mengancam kepentingan Amerika Serikat. Hal ini tampak dari sikap Amerika Serikat kepada Iran, Sudan, Irak, Afghanistan, atau kepada kelompok-kelompok Islam. Sudah sangat sering Amerika Serikat menggunakan alasan ini untuk menjatuhkan pemerintahan yang tidak lagi dianggap mampu menampung aspirasi kepentingan Amerika; seperti kejatuhan Marcos di Filipina dan Soeharto di Indonesia. Cara itu bisa dilakukan secara halus atau secara transparan, lewat berbagai pernyataan serta berbagai bantuan kepada kelompok oposisi atau LSM.

Sementara itu, isu HAM dan demokrasi tidak pernah digunakan, kalau seandainya tidak menguntungkan kepentingannya. Contohnya adalah perlindungan membabi-butakan Amerika Serikat atas Israel yang jelas-jelas melanggar demokrasi dan HAM; reaksi Amerika Serikat yang cenderung mendukung pemerintahan Aljazair, padahal sebenarnya FIS secara demokratis menang; diamnya Amerika Serikat terhadap fakta pembantaian

rakyat Muslim oleh pemerintahan dukungan Amerika Serikat di berbagai negara dan daerah seperti pembantaian suku Kurdi oleh Turki, penindasan pemerintahan Filipina di Moro, penekanan Thailand terhadap Pattani, termasuk berbagai peristiwa di Indonesia (seperti pembantaian di Tanjung Priok, Lampung, Aceh, dan terakhir di Ambon).

Di samping itu, banyak undang-undang lain yang dirancang Amerika Serikat kemudian diinternasionalisasikan atau sedang dalam proses internasionalisasi. Jelas, UU itu dibuat berdasarkan ideologi kapitalisme yang diemban Amerika Serikat dan untuk kepentingan Amerika Serikat. Contohnya adalah UU percobaan senjata nuklir dan larangan percobaan senjata nuklir, yang hanya mengakui lima negara yang boleh memiliki nuklir (Amerika Serikat, Cina, Perancis, Inggris dan Rusia); UU yang digodok di Kongres Amerika Serikat tentang penjaminan atas kebebasan beragama, yang isinya menyudutkan negara-negara yang tidak memberikan kebebasan bagi pengembangan agama (terutama Kristen) di dunia (hampir sebagian besar negeri yang dituduh adalah negara-negara Muslim); atau UU antiteroris yang menyerang negara-negara atau kelompok-kelompok perjuangan (terutama kelompok Islam) yang tidak sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat. Amerika Serikat juga telah mengeluarkan beberapa UU kontroversial yang melarang negara di dunia melakukan perdagangan dalam jumlah tertentu dengan negara-negara yang selama ini menentang Amerika Serikat seperti Iran, Sudan, dan Irak.

Dalam serangan Amerika Serikat ke Afganistan ini, juga tampak bahwa apa yang dikatakan oleh Amerika Serikat yakni dalam rangka mempertahankan demokrasi dan kebebasan dunia adalah sebaliknya. Amerika Serikat justru banyak melanggar demokrasi dan HAM.

### C. Amerika Negara Hegemoni Penguasa Dunia

Semenjak berakhirnya Perang Dingin bahkan hingga sekarang, belum ada yang memungkiri status Amerika sebagai pemimpin dunia saat ini. Beberapa istilah melekat erat ketika membicarakan tentang keunggulan Amerika. Mulai dari adidaya, adikuasa, super power, great power, central power, hegemoni serta beberapa istilah lainnya yang menunjukkan betapa hebatnya Amerika kini dalam percaturan dunia.

Lebih dari satu dekade, kolumnis politik Charles Krauthamer menyatakan dalam tulisannya kehadiran sesuatu yang disebutnya “*moment unipolar*” sebuah periode dimana ada satu negara adi daya, Amerika Serikat, yang jelas-jelas berdiri diatas komunitas internasional.<sup>20</sup> Tahun berikutnya Uni Soviet runtuh, ekonomi dan militer rusia merosot tajam, dan jepang mandek, sementara Amerika Serikat mengalami perluasan ekonomi yang terlama dan merupakan salah satu yang terkuat sepanjang sejarah.<sup>21</sup>

Secara fundamental dapat ditelaah bahwasanya setiap tindakan yang dilakukan oleh Negara baik dalam sekalan internal maupun eksternal

---

<sup>20</sup>. Krauthamer Charles, “The Polar Moment Revisited” The National Interest-winter 2002/2003

<sup>21</sup>. Stephen G. Brooks dan William C. Wohlforth, “Keunggulan Amerika dalam Tinjauan”, dalam *Amerika dan Dunia, Memperdebatkan Bentuk Baru dalam Politik Internasional*, (Jakarta: Freedom Institute dan Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 267.

dilakukan dengan tujuan yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengejar, memperoleh dan mempertahankan kepentingan nasional sesuai dengan tujuan dan cita-cita Negara. Kepentingan nasional tidak dapat diperoleh hanya dengan mengandalkan sumber daya internal.

Status hegemoni yang diperoleh Amerika saat ini memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi kepentingan nasional Amerika. Dengan hegemoni yang diraihinya, Amerika dapat melenggangkan kekuasaanya dalam percaturan global. Hegemoni yang melekat pada identitas Amerika saat ini akan memberikan kemudahan bagi upaya pelestarian eksistensi bidang-bidang vital penyelenggaraan Negara seperti ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, bahkan ideologinya agar tetap berada pada lini terdepan dunia.

Dengan hegemoni yang diraihinya, dapat menjadi jalan utama Amerika untuk mencapai dan mempertahankan kepentingan nasional. Dan menjadi sumbangan yang besar bagi kepentingan nasional Amerika.

Tidaklah berlebihan jika Amerika dikatakan sebagai Negara hegimoni yang menjadi pemimpin bagi Negara lain di dunia, setidaknya dari berakhirnya perang dingin hingga sekarang ini. Amerika memiliki pengaruh dan dominasi yang kuat dalam berbagai bidang vital penyelenggaraan Negara. Dari segi ekonomi, Amerika merupakan Negara yang makmur dan sejahtera yang diperoleh dari kematangan dan perjalanan sejarah yang cukup panjang dan penuh tempaan. Dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi, Merika menjadi pioneer dalam berbagai kemajuan, pengembangan dan

penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dunia. Demikian juga dengan pengembangan industry.

Tidaklah mudah meraih status sebagai Negara hegemoni ini. Amerika membutuhkan perjalanan panjang dengan segenap perjuangan dan pengorbanan. Oleh karenanya wajar saja setiap presiden Amerika yang memimpin Amerika berkeinginan keras untuk menjaga dan melestarikan status hegemoni tersebut demi mempertahankan eksistensi negaranya. Meskipun modus dalam mempertahankan eksistensi ini berbeda oleh setiap presiden, namun mereka tetap melaksanakan dengan tujuan yang sama mempertahankan hegemoni Amerika.

#### **D. Hubungan Amerika dengan Libya**

##### **1. Awal Hubungan Amerika dengan Libya**

Hubungan antara Libya dan Amerika dimulai sejak Raja Idris I bertindak sebagai pemimpin pemerintahan. Italia merebut Libya dari kekaisaran Ottoman dan menjadikan Libya sebagai wilayah jajahannya. Libya mendapat kemerdekaannya setelah Italia menyerah kepada sekutu dalam PD II. Tahun 1951, Amerika mendukung kemerdekaan Libya dan disusul dengan peningkatan hubungan sampai tingkat kedutaan.<sup>22</sup>

Semasa revolusi September 1969 hingga 1986 terjadi perubahan penting antara hubungan antar kedua Negara (Libya-Amerika). Sejak 1969

---

<sup>22</sup>. "Islam, AS, dan Tesis Huntington", dalam <http://www.voanews.com/indonesian/2008-04-11-voa11.cfm>, diakses tanggal 12 Mei 2010.

hubungan antara Libya dengan Amerika mulai berubah, karena pada saat itu, Libya mulai menyusun semua hal baik dalam dan luar negerinya berdasarkan prinsip kebebasan dan kedaulatan sepenuhnya. Hubungan dengan Negara-negara luar mulai terlihat dan diatur termasuk hubungan dengan Amerika Serikat.

Lalu tidak lama setelah itu hubungan Amerika dan Libya terhenti ketika kapten Muammar Khadafi memimpin revolusi Al Fatah untuk menyingkirkan Raja Idris.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan Libya-Amerika, yang Pertama hubungan antara Amerika dan Libya mulai memburuk setelah revolusi September 1969. Ini adalah saat kenaikan Kolonel Muammar Khadafi. Usaha Kolonel Khadafi untuk menegakkan kebebasan dan kedaulatan yang sebenarnya di Libya dan menjadikan Negara tersebut sebagai pemain utama di arena politik antar bangsa di Asia Tenggara dan Afrika, hal ini menimbulkan banyak reaksi atau tanggapan negative dari Negara lain. Khususnya datang dari Amerika yang telah menyelesaikan urusan dan peranannya di Negara-negara Afrika dan Asia tenggara.

Kedua, usaha Libya untuk meraih kebebasan dan kemerdekaannya dengan cara menghentikan hubungan dengan Negara asing agar pengaruh Negara asing tidak masuk ke Libya membuat hubungannya dengan Amerika Serikat menjadi tidak harmonis lagi. Hubungan ini bertambah rumit ketika Libya mendukung nasionalisme Arab dan gerakan nasionalisme di benua Afrika

Ketiga, hubungan tidak baik antara kedua Negara dapat dilihat dari berbagai perspektif seperti perdagangan antara kedua Negara menurun sejak 1969. Sebelumnya hubungan anatar kedua Negara baik-baik saja. Ini dapat dilihat bukan saja dari kehadiran tentara-tentara Amerika Serikat di Libya sebelum revolusi tahun 1969 tersebut akan tetapi juga terwujudnya suatu komunitas perdagangan Amerika Serikat di Tripoli.

Keempat, hubungan tidak baik antara Amerika Serikat dengan Libya dapat dikaitkan dengan beberapa faktor seperti persepsi Amerika Serikat terhadap Libya sebagai Negara teroris dan pendukung teroris, pengaruh media barat yang menampilkan Libya dalam perspektif negatif dan pihak-pihak yang membantu menggambarkan Libya seperti yang ditampilkan oleh media barat.

Dan yang terakhir, pada tahun 1986. Tahun ini merupakan titik penting hubungan antara Libya dan Amerika Serikat terhenti pada tahun ini.. Perwakilan atau Duta Besar, suatu indikator yang menunjukkan adanya hubungan baik antara kedua Negara ditarik oleh Amerika Serikat dari Libya dan begitu pula sebaliknya. Harapan untuk membangun hubungan baik antar kedua Negara mulai lahir pada akhir 1990an. Berbagai perkembangan positif yang terjadi di Libya telah membantu perkembangan hubungan baik antara Libya dan Amerika Serikat. Dan akhirnya pada Senin 29 Juni 2004 di tripoli<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>. AS membuka HUbungan Politik dengan Libya (diakses tanggal 30 Mei 2013) melalui <http://arsip.gatra.com//2004-06-29/artikel.php?id=40409>

Amerika Serikat membuka kembali hubungan diplomatik dengan Libya setelah terputus sekian lama.

Akan tetapi walaupun Amerika Serikat dan Libya telah menjalani hubungan baik yang begitu lama, Khadafi tetap menutup pasar dalam negerinya. Jadi bisa di bilang hubungan Amerika Serikat dan Libya hubungan yang dingin.

Hingga pada akhirnya Amerika Serikat memutuskan untuk membantu para pemberontak untuk menjatuhkan kekuasaan Khadafi. Karena kepemimpinan Khadafi dianggap tidak terlalu baik untuk masyarakat Libya, dan banyak melanggar asas-asas demokrasi yang telah di anut oleh Amerika Serikat sebagai Negara pelopor demokrasi.

Muammar Khadafi telah lama dikanal sebagi pemimpin yang diktator. Khadafi memeproleh kekuasaanya dengan melakukan kudeta tidak berdarah pada tahun 1969 terhadap raja Idris, yaitu raja yang berkuasa di Libya pada saat itu. Sejak saat itulah Khadafi mulai berkuasa di Libya, pola pemerintahan yang otoriter tersebut telah membawa rakyat Libya dalam kekangan rezim Khadafi. Hal ini tentunya telah menunjukkan bahwa Libya sejak lama telah berada dalam pemerintahan yang otoriter dan tidak demokratis.

## 2. Sikap Amerika Serikat terhadap Libya Selama ini

Amerika Serikat sebagai Negara pelopor demokratis tidak pernah turun tangan dalam pemerintahan Libya selama ini, walaupun telah mengetahui bahwa Libya bukanlah Negara demokratis. Hal ini tidak seperti ketika Amerika Serikat menyerang Negara yang di anggap tidak demokratis dan pemerintahnya banyak melakukan pelanggaran HAM, seperti Negara Iraq dan Afganistan

Ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa Amerika Serikat tidak turun tangan meneriakkan demokrasi dan membela HAM di Libya. Hal ini disebabkan karena belum adanya alasan yang tepat yang bias digunakan oleh Amerika Serikat untuk menyerang Libya atau menyerang pemerintahan Moammar Khadafi, selain itu citra Amerika Serikat dimata dunia sedang memburuk akibat presiden sebelum Obama menyerang Irak dan Afganistan dengan alasan memerangi terosisme. Seandainya Amerika Serikat Menyerang tanpa adanya alasan yang tepat maka citra buruk Amerika Serikat di mata dunia akan semakin bertambah. Obama selaku presiden Amerika Serikat ingin mengembalikan citra baik Amerika Serikat dimata dunia.

Banyak pihak yang akan mengutuk tindakan Amerika Serikat jika Amerika Serikat melakukan penyerangan terhadap Libya jika tidak memiliki satu alasan yang tepat. Penegakan demokrasi dan HAM tidak bias dijadikan sebagai landasan Amerika Serikat untuk menyerang Libya.

Oleh karena itu semenjak adanya isu pergolakan politik yang terjadi di Libya oleh masyarakat Libya sendiri, Amerika Serikat kemudian datang

sebagai Negara demokrasi yang ingin mengakkan demokrasi dan HAM dengan alasan ingin membela rakyat Libya yang telah lama ditindas oleh pemerintahan Khadafi. Selain itu juga Libya banyak melakukan pembantaian rakyat sipil pada saat kudeta tersebut. Tentunya selain itu Amerika Serikat juga memiliki kepentingan datang ke Libya. Amerika Serikat seolah-olah mendapat legitimasi, karena mendapatkan alasan yang tepat untuk menyerang Libya.